BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN * UNIKOM *

2.1 Sejarah Perusahaan

Pembangunan Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam perkembangannya tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan juga pemerintah, melalui suatu departemen yang diserahi tugas dan tanggung jawab secara berkesinambungan untuk membina dan mengembangkan koperasi serta usaha kecil guna menumbuhkan kemajuan dan kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia. Di Jawa Barat khususnya, pembangunan koperasi telah menunjukan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota maupun nilai usaha koperasi. Namun apabila kita melihat kebelakang, perkembangan dan perjalanan sejarah perkoperasian tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan dan kebijaksanaan politik pemerintah. Sebagaimana lazimnya perubahan dalam struktur pemerintahan juga akan mempengaruhi keberadaan dan peranan perkoperasian dalam menjalankan fungsinya.

Maka dari itu kondisi dan keadaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sekarangpun tidak terlepas dari sejarah yang merupakan rangkaian dari perubahan struktur pemerintahan tersebut, dengan kronologis sebagai berikut:

2.1.1 Masa pemerintahan Belanda.

Pada tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan koperasi dibawah lingkungan Departemen Dalam Negeri yang mempunyai tugas pendaftaran dan pengesahan koperasi, yang sebelumnya tugas ini dilakukan oleh notaris.

Pada tahun 1935 jawatan koperasi dipindahkan ke Departemen Ekonomi *Zaken* dan dimasukkan dalam bagian Usaha Hukum *Afdeeling Algemeene Economishe Aangelegeheden.* Kemudian pada tahun 1939 jawatan koperasi dipisahkan dari "*Afdeeling Algemeene Economishe Aanglegeheden*" ke Departemen Perdagangan Dalam Negeri *Afdeeling Cooperatie en Binnenlanga The Handel.* Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan penerangan tentang koperasi tetapi meliputi perdagangan untuk Bumi Putera.

2.1.2 Masa Pemerintahan/Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 berpengaruh pula terhadap keberadaan Jawatan koperasi. Pada saat itu jawatan koperasi diubah menjadi "*Syomin Kumiai Tyou Djimusyo*" dan kantor yang berada di daerah diberi nama "*Syomin Kumiai Syodańsyo*". Tahun 1944 didirikan "*Jumin Keizakyoku*" (Kantor Perekonomian Rakyat) dimana urusan koperasi menjadi bagiannya dengan nama "*Kumiaka*" yang tugasnya adalah mengurus segala aspek yang bersangkutan dengan koperasi.

2.1.3 Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka dari tangan penjajah, pada tahun 1945 muncul Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri dibawah Kementerian Kemakmuran. Setahun kemudian yaitu pada tahun 1946 urusan Perdagangan Dalam Negeri dimasukkan pada Jawatan Perdagangan, sedangkan Jawatan Koperasi berdiri sendiri khusus mengurus soal koperasi. Tanggal 12 juli 1947 gerakan koperasi mengadakan kongres di Tasikmalaya Jawa Barat, sejak saat itu tanggal 12 Juli dinyatakan sebagai hari kopersi.

Pada tahun yang sama Pusat Jawatan Koperasi ditempatkan di Yogyakarta dan tugasnya adalah mengadakan kontak dengan Jawatan koperasi di berbagai daerah lainnya. Ketika negara Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk tahun 1950, Pusat Jawatan Koperasi kembali berkedudukan di Jakarta.

2.1.4 Masa Pemerintahan Orde Lama

Pada tahun 1958 jawatan koperasi menjadi bagian dari Kementerian Kemakmuran. Berdasarkan Undang-Undang No. 79 tahun 1958 pemerintah berkewajiban membimbing rakyat kearah koperasi. Tahun 1960 perkoperasian kemudian diurus oleh Menteri Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat desa (Transkopemada) yang dipimpin oleh Achmadi.

Setelah itu tahun 1963 Transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi yang dipimpin oleh Achmadi. Tahun 1964 Departemen Koperasi diubah kembali menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi.

2.1.5 Masa Pemerintahan Orde Baru

Tahun 1966 Departemen Koperasi berdiri sendiri, dan dalam tahun yang sama diubah lagi menjadi Kementrian Perdagangan. Pada tahun 1967 ditetapkanlah Undang-Undang Koperasi No. 12 Tahun 1967, kemudian Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 15 Tahun 1967 menunjuk Direktur Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Dalam Negeri.

Tahun 1968 Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Pada tahun 1973 terjadi perubahan struktur Departemen, maka pada saat itu Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Tenaga Kerja. Tahun 1978 Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Perdagangan dan Koperasi.

Pada tahun 1983 sejak Kabinet Pembangunan IV, berdirilah Departemen Koperasi dengan susunan organisasi dan tatakerjanya ditetapkan dalam Kepmen No. 07/M/kpts/VI/1983. Kemudian tahun 1993 pada Kabinet Pembangunan VI Departemen Koperasi ditambah tugasnya untuk melaksanakan pembinaan pengusaha kecil sehingga sebutannya ditambah menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Susunan organisasi dan tatakerjanya ditetapkan dalam Kepmen No.1554/KEP/M/X/1993.

2.1.6 Masa Pemerintahan Reformasi

Perubahan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Jawa Barat menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 2001. Sehubungan dengan meningkatnya kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi tolak ukur perekonomian masyarakat. Sekaligus memberi sumbangan nyata dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Melalui Peraturan Daerah Jawa Barat No.15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat, ditetapkan Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat yang menangani Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Penulis melaksanakan kerja lapangan di Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Bandung. Awal ketertarikan penulis melaksanakan kerja praktek ditempat tersebut dikarenakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jawa Barat merupakan salah satu instansi pemerintah dibidang koperasi yang mempunyai SubDin Bina Program. SubDin ini berfungsi sebagai pengelola program-program dan laporan..

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Bentuk dari badan hokum perusahaan yang penulis alami adalah berbentuk badan atau instansi pemerintah, dimana instansi tersebut berbentuk koperasi dan usaha kecil menengah.yang merupakan badan hukum negara.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Barat termasuk instansi yang melayani masyarakat yang mempunyai usaha kecil maupun menengah menurut hukum ekonomi

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jawa Barat merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dibidang koperasi yang melayani usaha kecil maupun usaha menengah di propinsi Jawa Barat.

2.5 Bidang Pekerjaan Dinas Tempat Kerja Praktek

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jawa Barat merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dibidang koperasi yang melayani segala usaha kecil maupun usaha menengah yang membutuhkan tenaga koperasi di propinsi Jawa Barat.

2.6 Struktur Organisasi Perusahaan

